

STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA YANG RESPONSIF GENDER PADA BPBD DAN MDMC TERHADAP BANJIR TAHUNAN DI KABUPATEN SINJAI

Nirwana¹, Muhlis²,

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

¹misswana@gmail.com

²muhlispasca@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the differences in the implementation of gender responsive disaster management by the regional disaster management agency and the Muhammadiyah Disaster Management Center to annual floods in Sinjai Regency. this Research was a qualitative descriptive comparative study where the facts and data found in the field are then compared. The results of this study indicated that the fundamental difference from both disaster management institutions was in the concept of management that is used as a reference. BPBD is entirely guided by Perka BNPB No. 13/2014 concerning Gender Mainstreaming in the Field of Disaster Management, while MDMC combines 2 disaster management concepts namely Perka BNPB No. 13/2014 regarding Gender Mainstreaming in Disaster Management and Disaster Jurisprudence issued by Muhammadiyah. in implementations both of the institutions, ere different in recovery level, MDMC through others autonomous organizationthe of Muhammadiyah continues to make an efforts to restore economic conditions through training to improve skills and provide ongoing training both in terms of education and spiritual to affected victims. as of MDMC.

Keywords:

Keywords: disaster management, gender responsive, BPBD, MDMC.

Pendahuluan

Sebagai negara yang terletak di daerah rawan, Indonesia berhadapan dengan berbagai risiko bencana; mulai dari tanah longsor, gempa bumi, banjir hingga tsunami (UNISDR, 2009). Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah di Indonesia yang sangat rawan terkena Bencana alam, menurut data dari BNPB selama 5 tahun terakhir Sulawesi Selatan mengalami 311 kali bencana alam dengan jumlah kejadian banjir pada tahun 2015 sebanyak 14 kali, 2016 terjadi banjir sebanyak 29 kali, 2017 sebanyak 32 kali, 2018 sebanyak 24 kali dan 2019 sebanyak 15 kali. tingginya jumlah korban terdampak hingga kerusakan fasilitas umum juga adalah hal yang tak terelakkan, dampak dari banjir bandang tahunan yang terjadi selama 5 tahun di Sulawesi Selatan terbilang sangat tinggi.

Data jumlah korban terdampak dan mengungsi yang disebabkan oleh banjir bandang tahunan di Sulawesi Selatan adalah pada tahun 2015 sebanyak 19,878 terdampak dan mengungsi, 2016 sebanyak 123,079 terdampak dan mengungsi, 2017 sebanyak 65,054 terdampak dan mengungsi, 2018 sebanyak 109,387 terdampak dan mengungsi serta 2019 sebanyak 28,435 terdampak dan mengungsi. Dari data bencana yang terjadi setiap tahun di Sulawesi Selatan, Bencana banjir bandang tahunan adalah bencana yang paling banyak memberikan dampak kepada masyarakat, paling banyak menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan rumah warga serta menyebabkan paling banyak pengungsi yang harus didampingi.

Setiap bencana tentu akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi yang terkena, apalagi untuk perempuan yang rentan terhadap dampak negatif bencana. Menurut Titin Murtakhamah (2013), meskipun laki-laki dan perempuan mengalami kerentanan yang berbeda, tetapi sebagian besar perempuan, terutama dari kalangan miskin, lanjut usia, dari kelompok minoritas sosial dan suku minoritas, memiliki strategi penanganan terbatas dan berisiko paling tinggi terkena dampak bencana alam. Oleh karena itu, penanggulangan bencana berperspektif gender harus didasarkan pada kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan untuk mengintegrasikan gender dalam pengelolaan bencana adalah untuk memastikan bahwa skema kesiapsiagaan dan antisipasi bencana, hingga kemampuan untuk pemulihan dari dampak bencana, bisa dimiliki secara merata antar jenis kelamin dan umur. Dengan terpenuhinya hak semua orang maka akan mengantisipasi munculnya bencana baru yang akan menambah beban dan dampak yang dirasakan terutama oleh kelompok rentan seperti perempuan.

Terkait penanggulangan bencana yang terjadi di setiap daerah maka pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lembaga ini adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melakukan kiprah penanggulangan tragedi di kawasan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibuat menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibuat menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Selain lembaga pemerintah beberapa lembaga dari organisasi Islam juga turut berperan dalam mitigasi penanggulangan Bencana, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia juga turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana dengan membentuk lembaga penanggulangan bencana (LPB) di Muktamar Jogja tahun 2010 kemudian disahkan dan lebih dikenal dengan sebutan *muhammadiyah disaster management center* (MDMC). Tugas utama MDMC ialah mengkoordinasi sumberdaya Muhammadiyah dalam proses penanggulangan bencana. Gerakan MDMC tidak hanya terbatas pada penanggulangan bencana semata, melainkan juga pada mitigasi, kesiap siagaan, tanggap darurat dan juga rehabilitasi paska bencana. MDMC menggunakan kode etik kemanusiaan internasional dan juga piagam kemanusiaan internasional dalam proses penanganan dan penanggulangan bencana. Selain itu juga MDMC melakukan penanggulangan bencana selaras dengan Hyogo Framework for Action serta membangun basis tangguh bencana melalui komunitas komunitas serta melalui struktur Muhammadiyah di daerah daerah (mdmc. 2017)

Pada bencana banjir tahunan yang terjadi di Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir, termasuk di Kabupaten Sinjai kedua lembaga penanggulangan bencana ini sangat berperan penting dalam proses mitigasi dan penanggulangan bencana. Sebagaimana fakta dan data yang digambarkan di atas bahwa proses penanggulangan bencana haruslah responsif terhadap gender mengingat tingginya tingkat kerentanan bias gender pada proses mitigasi dan penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana yang responsif gender secara internal BPBD berpedoman kepada Perka BNPB No. 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana sedangkan MDMC berpedoman kepada Fiqih kebencanaan dengan ciri khas yang Islami yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Berdasarkan hal ini

maka peneliti tertarik untuk melakukan studi komparasi terkait implementasi penanggulangan bencana yang responsif gender yang dilakukan oleh BPBD dengan acuan PERKA BNPB No. 13/2014 dan bagaimana MDMC mengimplementasikan penanggulangan bencana yang responsif gender dengan acuan fiqih kebencanaan yang terkenal dengan konsep islami, terhadap bencana banjir bandang tahunan di Sulawesi Selatan.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (M. Nazir, 1988).

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang terdiri atas:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dalam konteks ini, peneliti melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan (S. Eko Putro Widoyoko, 2014).
- b. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden atau orang yang diinterview dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- c. Dokumentasi. Dilakukan dengan mengambil data-data yang mendukung penelitian atau data yang diperoleh dari berbagai literatur dan instansi yang terkait dengan penelitian ini.
- d. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugioyono, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus dan relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sinjai serta pengurus dan relawan Muhammadiyah Disaster management Center, data juga akan bersumber dari korban terdampak banjir di Kabupaten Sinjai.

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles dan Huberman yakni analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugioyono, 2009). Hal ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Koleksi data. Data berupa proses wawancara dikoleksi oleh peneliti sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai data penelitian.
- b. Reduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting dan mencari tema yang dianggap penting dan relevan
- c. Display atau penyajian data yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya yang merupakan lanjutan setelah data direduksi dan melalui penyajian data tersebut, maka data tentang penanggulangan bencana yang responsif gender terhadap banjir bandang tahunan di Sulawesi selatan.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep dan Implementasi Penanggulangan Bencana yang Responsif Gender oleh BPBD Kab. Sinjai.

1. Konsep Penanggulangan Gender oleh BPBD Kabupaten Sinjai

Konsep penanggulangan bencana oleh BPBD Sinjai secara umum mengacu kepada Perka BNPB No. 13/2014. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender, di lingkungan BNPB dan BPBD dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG). Struktur, keanggotaan dan masa tugas Pokja PUG di BNPB ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama, sedangkan di BPBD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPBD.

Untuk menyelaraskan rencana dan pelaksanaan program pengarusutamaan gender di bidang PB di tingkat nasional dilakukan oleh BNPB dan kementerian yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga (K/L) terkait. Di tingkat daerah, penyelarasan rencana dan pelaksanaan program pengarusutamaan gender di bidang PB dilakukan oleh BPBD bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang PB dilakukan oleh BNPB dan kementerian yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan koordinasi dengan Kementerian

Dalam Negeri dan K/L terkait. Di tingkat daerah, BPBD melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang PB kepada Gubernur untuk tingkat provinsi dan kepada Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada BNPB.

Pada tahap pascabencana, pengarusutamaan gender dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan alokasi sumber daya rehabilitasi dan rekonstruksi. Implementasi pengarusutamaan gender di bidang PB perlu kerjasama dengan banyak pihak, seperti dengan K/L, SKPD, universitas, lembaga usaha, lembaga non-pemerintah, lembaga internasional, dan lain-lain. Dalam penyusunan regulasi dan pengembangan kapasitas dalam PB responsif gender BNPB/BPBD bekerjasama dan berkoordinasi dengan K/L dan SKPD terkait. Untuk mendorong penelitian-penelitian dalam PB responsif gender BNPB/BPBD bekerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, lembaga usaha, organisasi non-pemerintah dan para pihak lainnya. Sedangkan untuk mempromosikan dan melaksanakan program PB responsif gender BNPB/BPBD bekerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, lembaga usaha, organisasi non-pemerintah, media massa dan jejaring sosial.

2. Implementasi Penanggulangan Banjir yang dilakukan oleh BPBD Sinjai

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai bagaimana BPND Kabupaten sinjai mengimplementasikan konsep penanggulangan bencana yang responsif gender yang merujuk kepada Perka BNPB No. 13/2014, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada relawan BPBD kabupaten Sinjai. Dalam hal observasi peneliti mencoba menelusuri jejak dokumentasi penanggulangan bencana yang pernah dilakukan oleh BPBD di kabupaten Sinjai beberapa tahun terakhir, yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah data penanggulangan bencana terbaru yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Sinjai. dalam hal wawancara saat ini wawancara yang dilakukan baru kepada 2 relawan BPBD kabupaten Sinjai dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat sebelumnya.

Setelah mendapatkan data dari asesment awal, para relawan akan turun memberikan tindakan kepada korban terdampak mulai dari penyediaan penampungan dan hunian sementara (seperti menyediakan kebutuhan khusus untuk laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam penampungan dan hunian sementara; memastikan, namun dalam kasus banjir tahunan di

kabupaten Sinjai, kebanyakan masyarakat lebih memilih mengungsi ke rumah kerabat daripada ke tempat pengungsian, penyediaan penampungan sementara dilakukan sesuai dengan standar pelayanan penanggulangan bencana, misalnya disediakan khusus bagi korban yang berkeluarga.

Demikian gambaran implementasi penanggulangan bencana pada banjir tahunan di kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh BPBD Sinjai. berdasarkan data wawancara bisa disimpulkan bahwa tidak semua konsep penanggulangan bencana yang responsif gender teraplikasi dalam penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD, dikarenakan beberapa faktor salah satunya karena faktor sarana dan prasarana serta tim yang kadang yang kurang profesional dan profesional.

B. Konsep dan Implementasi Penanggulangan Bencana oleh MDMC Sinjai

1. Konsep Penanggulangan Bencana oleh MDMC Sinjai

Lembaga Penanggulangan Bencana atau yang lebih dikenal dengan Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), merupakan organisasi yang lahir di tubuh perserikatan Muhammadiyah, organisasi ini mulai banyak melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial, hal ini terjadi secara alamiah, karena memang embrio organisasi Muhammadiyah pada awal kelahiran sangat lekat dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sangat terpuruk, karena sistem sosial yang ada, akhirnya membentuk sistem yang melemahkan rakyat jelata, selain aktifitas sosial gerakan keagamaan merupakan ciri khas pada perserikatan Muhammadiyah, organisasi ini mempunyai konsep yang kemudian menginspirasi dan juga akhirnya melahirkan gerakan – gerakan dakwah, seperti Lembaga penanggulangan bencana atau yang lebih dikenal dengan MDMC, gagasan itu yakni Spirit Al – Maun dalam pengimplementasiannya .

MDMC hari ini dalam mengimplementasikan penanganan bencana merujuk kepada Fiqih Kebencanaan yang di putuskan pada Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke XXIX di Yogyakarta 1-4 syakban 1436 H/19-22 mei 2015 . Dalam pedoman ini di uraikan bahwa Bencana yang telah terjadi merupakan sebuah kepastian yang nyata dan niscaya (*conditio sine qua non*). Dengan demikian, salah satu perkara yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi peristiwa yang telah terjadi tersebut. Peristiwa bencana itu sendiri bukanlah sebuah “persoalan”, karena memang sudah terjadi dan menimpa kita, apapun keadaan dan situasi kita. Oleh karena itu, persoalan yang sebenarnya adalah bagaimana kita menghadapi “persoalan” itu sendiri. Untuk menyikapinya, dibutuhkan sebuah kesadaran yang utuh akan bencana dari pihak-pihak yang terkait bencana, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan

pemerintah. Pihak-pihak ini harus memiliki sikap positif ketika bencana telah terjadi. Terkait konsep penanggulangan bencana yang responsif gender secara tertulis dan detail tidak termuat dalam fiqih kebencanaan yang menjadi rujukan MDMC dalam implementasi penanggulangan bencana, namun tahapan proses penanggulangan bencana termuat dengan jelas didalamnya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tepat dan baik, pengkajian kebutuhan pasca bencana sangat dibutuhkan. Tahapan pengkajian meliputi: 1. Pengkajian akibat bencana yang meliputi kajian organisasi diluar atau non muhammadiyah, secara sederhana MDMC berupaya untuk kerusakan dan kerugian 2. Pengkajian dampak bencana baik untuk aspek sosial dan ekonomi 3. Pengkajian kebutuhan pemulihan yang didasarkan pada pengkajian akibat bencana serta dampak bencana 4. Penyusunan Rencana Aksi program pemulihan pasca bencana Keberhasilan dan efektifitas proses pemulihan bencana akan sangat menentukan mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat khususnya.

2. Implementasi Penanggulangan Bencana MDMC Sinjai

Keberadaan MDMC memang menarik, karena lembaga ini memiliki struktur organisasi dari pusat hingga daerah, sehingga dimungkinkan MDMC bisa langsung menangani persoalan – persoalan bencana di daerah masing – masing. Terkhusus kabupaten Sinjai meskipun belum memiliki struktur pengurus secara resmi namun beberapa kader muhammadiyah telah mengikuti pelatihan dasar relawan siaga bencana 1 dan 2 untuk beroperasi di kabupaten Sinjai, struktur kepengurusan tentu saja merujuk kepada MDMC tingkat provinsi. Struktur yang terbentuk, membuat MDMC menjadi lebih lunak, selain menjadi mitra pemerintah MDMC juga sering berkolaborasi dengan berbagai elemen yang terkait dengan penanggulangan bencana, hal tersebut bisa dilihat dari struktur organisasi yang mendukung gerak dan langkah MDMC dalam menyelesaikan persoalan kebencanaan.

Dalam tahapan implementasi penanggulangan bencana yang responsif gender oleh MDMC, peneliti memberikan beberapa pertanyaan wawancara kepada relawan dengan menggunakan panduan *thematic gender checklist in reduction disaster*, sebagian besarnya telah terjawab pada wawancara di atas.

C. Perbedaan Implementasi Penanggulangan Bencana yang Responsif Gender pada BPBD dan MDMC pada Banjir Tahunan di Kabupaten Sinjai

Secara konsepsi sudah bisa dilihat dengan jelas bagaimana perbedaan penanganan bencana yang responsif gender yang di terapkan oleh BPBD dan MDMC terhadap banjir tahunan

di kabupaten Sinjai. BPBD yang mengacu pada Perka BNPB No. 13/2014 sedangkan MDMC memadukan antara konsep yang tertera dalam Perka BNPB No. 13/2014 dengan Fiqih Kebencanaan yang di keluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. dalam pembagian tim penanganan bencana BPBD kepada struktur yang sudah dibentuk secara profesional dan proforsional, sedangkan MDMC dalam implementasinya, selain menggerakkan struktur yang ada juga melibatkan seluruh ortom Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam tahapan penanganan bencana sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara dengan para responden baik dari tim MDMC, BPBD dan juga masyarakat terdampak, langkah penanganan korban banjir tahunan di kabupaten Sinjai oleh kedua lembaga tanggap bencana diatas hampir sama, berdasarkan thematic gender checklist untuk penanganan bencana. selain konsep yang sedikit berbeda hal lain dalam implementasi yang paling membedakan ada pada tahapan terakhir yakni pada tahap pemulihan.

Secara keseluruhan kehadiran dua lembaga tanggap bencana dikabupaten Sinjai sangat membantu bagi korban banjir yang hampir terjadi setiap tahunnya. Meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak hal yang perlu dibenahi sehingga warga lebih mandiri dan mampu saling memberdayakan sesama masyarakat dalam menghadapi bahkan mencegah datangnya banjir kembali. Kesadaran masyarakat adalah menjaga lingkungan adalah sebuah langkah awal yang pasti akan mengurangi dampak dari banjir tahunan yang tak terelakkan.

Kesimpulan

Dalam penanganan bencana banjir tahunan yang responsif gender di kabupaten Sinjai BPBD mengacu pada Perka BNPB No. 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, sedangkan MDMC mengkombinasikan antara Perka BNPB No. 13/2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana dan Fiqih kebencanaan yang di buat oleh PP Muhammadiyah yang di sahkan di Mukhtar Muhammadiyah di Solo pada tahun 2010. Dalam implementasinya kedua lembaga ini sudah melakukan sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada namun masih banyak kekurangan disebabkan sarana dan prasarana serta tim relawan yang kurang profesional dan proforsional, yang nampak berbeda secara signifikan adalah pada tahapan recovery/ pemulihan pasca bencana dimana MDMC lebih aktif memberikan pendampingan baik psikososial, ekonomi, pendidikan dan spiritual.

Daftar Pustaka

- Abdiel Hardwin Dito, A. P. (2015). Penentuan Variabel dalam Optimasi Jalur Evakuasi Bencana Tsunami di Kecamatan. *Teknik ITS*, 4(2), 2–5.
- Danianti riska dkk (2015) , *Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir diperumnas telagasari kota semarang*, Jurnal Pengembangan Kota Volume 3 No. 2 (90–99).
dibi.bnppb.go.id/
- Fauzi, Lukman M. Angga Nurdin R, I. N. (2014). JIPSi. *JIPSi (Ilmu Politik Dan Komunikasi)*, IV, 127–135.
- Gender: Pembelajaran Dari Gempa Bantul 2006. Editor Deny Hidayati. Jakarta: PT Dian Rakyat dan PPK-LIPI
- Hidayati, Deny, Widayatun, Inayah Hidayati. (2012). *Akses dan Keterlibatan Perempuan dan Laki-laki Dalam Penanganan Bencana”*
- Hilman Yusuf, (2017) “ *Konsep Penanggulangan bencana pada lembaga Muhammadiyah disaster management Center di Kabupaten Ponorogo*” Jurnal, FISIP Unmuh Ponorogo 2017.
- IDEP. (2007). *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. IDEP.
- Jan Hoesada. (2016). *Disaster Recovery Planning: Manajemen bencana Administrasi*. KSAP, 1-9.
- Muhammadiyah, L. P. B. P. P. (2012). (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) *Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2012* (pp. 1–33).
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nur Khotimah Suri. (2015). *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo*, 456–477.
- Oktarina, R. (2009). *Konsep Perancangan Sistem Informasi manajemen logistik Penanggualangan Bencana (Simlog-PB) berbasis Gis (Geographic Information System) di Indonesia* Rienna. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2009*.
- Pramono, R. (2016). *Sociological Perspective in Disaster Management . Masyarakat Dan Budaya*, 18(1), 81–96.
- Pincha, Chaman (2008), “*Gender-Sensitive Disaster Management: A Toolkit for Practitioners*”, *Oxfam America and NANBAN Trust*, Mumbai.

- Profil MDMC” <http://www.mdmc.or.id/index.php/profil-mdmc> diakses pada 4 mei 2017.
- Puspitasari Annisa Dkk (2018), *Partisipasi Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana di desa Pagerhajo, Kabupaten Kulonprogo*. Prosiding PIT KE-5 Riset Kebencanaan IABI UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018
- Susiana Sali dkk (2016), “ *Implementasi Penanggulangan Bencana Yang Responsif Gender*”
Jurnal Kesejahteraan Sosial Vol. VIII, No. 19/I/P3DI/oktober 2016
- Titin Murtakhamah, “ *Pentingnya Pengarusutamaan Gender dalam Program Pengurangan Resiko Bencana*” Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.2, No.1, Juni 2013
- Sugiyono (2013), *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 89.
- Sugiyono (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 246.
- Widyastuti, M. (2005). *Manajemen Bencana : Kajian dan Ruang Lingkup. Madani, II, 1–7.*